

PENDIDIKAN DAN ETIKA BERPOLITIK

Agustinus Pratisto Trinarso, Lic. Phil.¹

Abstract

Political education and political ethics interrelated . In Political ethics, human behaviors to gain power are understood and judged. In political education, our judges to all human behaviorsto gain power are presented, learnt and inherited to the next generation. In contemporary Indonesian context, these twofold fields are urgent to discuss. The discussion must consider some important matters, such as pluralism in Indonesian society, human right fulfillment, model of democracy wanted to build and the efforts to gain social justice.

Keywords: *Ethics, Politics, Political Education, Political Socialization*

Abstrak

Pendidikan politik dan etika politik adalah dua hal yang saling berkaitan. Dalam etika politik, tingkah laku manusia terkait dengan upayanya memperoleh kekuasaan dipahami dan dinilai. Dalam pendidikan politik, penilaian terhadap tingkah laku manusia terkait dengan kekuasaan dihadirkan, dipelajari dan ditanamkan pada generasi selanjutnya. Dalam konteks Indonesia masa kini, dua hal tersebut mendesak untuk didiskusikan. Diskusi ini harus mempertimbangkan beberapa hal penting, yaitu pluralisme masyarakat Indonesia, pemenuhan hak azasi, model demokrasi yang ingin dibangun dan upaya mencapai keadilan sosial.

Kata Kunci: Etika, Politik, Pendidikan Politik, Sosialisasi Politik

1. Pendahuluan

Membicarakan politik di ruang keIndonesiaan saat ini dapat segera mengundang perasaan skeptis untuk menanggapi, mengingat situasi politik negeri kita yang cukup memprihatinkan. Kasus-kasus kebobrokan para politisi Indonesia saat ini telah mendelegitimasi (membusukkan) lembaga-lembaga politik dan pemerintahan di mata rakyatnya. Membicarakan etika dalam berpolitik menjadi terasa sangat nisbi dan mengawang-awang, terlalu ideal dan tidak nyata. Akan tetapi, tersisa ruang harapan apabila kita melihat generasi muda, masa depan

¹ Pengajar di UNIKA Widya Mandala Surabaya

masyarakat Indonesia, serta peluangnya dalam kelangsungan dinamika hidup berbangsa, meskipun ruang itu belum jelas bagaimana bentuknya.

2. Filsafat Dan Politik

Filsafat adalah ilmu yang menggunakan sudut pandang kritis, analitis, spekulatif dan sistematis dalam mengkaji segala sesuatu, termasuk didalamnya adalah bidang politik.² Politik merupakan salah satu kajian dalam ilmu filsafat berkenaan dengan hidup bersama khususnya bagaimana mengupayakan hidup bersama yang lebih baik. Politik merupakan bidang yang cukup strategis dan menentukan, serta menarik minat banyak tokoh untuk memikirkannya. Henry J. Schmandt menyatakan, “ Tidak ada bidang ilmu pengetahuan dan peradaban manusia yang tidak tersentuh oleh gairah pemikiran politik”.³ Minat dalam bidang politik cukup besar karena menurut Aristoteles, manusia adalah *Zoon Politicon*, hewan politik. Dimanapun manusia berada, dia ada dalam masyarakat politik dan dia terlibat di dalamnya. Manusia secara kodratnya berusaha ingin memahami dunianya dan masa depannya, bertanya tentang siapa dirinya dan maksud serta tujuan eksistensinya. Manusia terarah pada pencarian kebenaran yang bersifat abadi termasuk terkait dia sebagai anggota suatu masyarakat. Disinilah terjalin erat filsafat dengan politik.

Istilah “Politik” itu sendiri merupakan bentukan kata yang berasal dari kata *polis*, sebuah gambaran masyarakat di era Yunani kuno. Polis merupakan sekumpulan orang membentuk masyarakat yang diatur oleh pemerintahan secara mandiri, memiliki hukum dan tata hidup yang cukup demokratis. Teori politik berarti seperangkat hipotesa dan pemikiran mengenai proses pemerintahan dan merujuk pada norma dan aturan yang mengontrol perilaku politik. Teori politik merupakan usaha untuk mendalami tentang dasar-dasar politik. Leo Strauss menekankan bahwa selain membicarakan tentang institusi dan kekuatan politis, teori

2 Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum, Akal dan hati sejak Thales sampai Capra*, Rosda Karya, Bandung, 2008, 13.

3 Henry J. Schmandt, *A History of Political Philosophy*, terj. *Filsafat Politik, Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2002, 3.

politik juga tentang tatanan politik yang baik dan jujur secara moral.⁴ Dapat dikatakan bahwa bicara tentang politik menyangkut selalu dua aspek yakni tentang apa itu politik dan bagaimana nilai-nilai dalam politik itu selalu terkait dengan etika dan moral. Dengan demikian dalam teori politik selalu ada bagian yang berisi tentang kajian etis atas politik. Tidak seperti ilmu-ilmu fisik, persoalan dalam ilmu politik selalu memiliki dimensi moral yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Filsafat politik bukan hanya sebuah ilmu kajian tentang sejarah klasik pemikiran politik saja, namun juga kajian tentang dinamika politik kontemporer dengan segala pemikirannya yang tetap terkait dengan etika dan moral public, dan berusaha mengarahkannya pada pemahaman yang lebih baik mengenai kehidupan politik, watak dan tujuannya yang benar bagi kepentingan umum. Di samping itu Filsafat politik juga mengukur dan membandingkan teori-teori politik untuk melihat relevansinya dengan keadaan politik kontemporer dan berusaha menemukan solusi bagi problem-problem politik yang muncul.

3. Dasar Filsafat Politik Klasik Sebagai Dasar Etis Berpolitik

Untuk dapat melihat lebih jelas etika berpolitik sebagai bagian yang penting dalam pendidikan, kita perlu memahami terlebih dahulu hal-hal apa saja yang melatarbelakangi atau menjadi landasan dari etika berpolitik. Dasar etika berpolitik diyakini lahir dalam sejarah peradaban Barat, khususnya diawali pada masa polis-polis di era Yunani kuno. Perjalanan panjang pemikiran tentang politik yang bertautan satu dengan yang lain dan berwarna spekulatif dapat dilihat dalam benang merahnya sebagai tradisi Klasik. Menjadi disebut klasik bukan semata karena hal tersebut bernilai kuno atau lama, namun pemikiran-pemikiran yang dikandungnya telah menjadi semacam acuan bagi pemikiran berikutnya.⁵

Menurut Schmandt, tradisi etika berpolitik klasik memiliki beberapa ciri khusus sebagai berikut:⁶

1. Karakter rasional, moral dan religius manusia

4 Lih. *Ibid.*, 4.

5 Bdk. *Ibid.*, 10.

6 Lih., *Ibid.*, 11-23.

Konsepsi politik harus menyangkut hidup manusia dan komunitasnya yang ingin mencapai tujuan hidup bersama. Hal ini menyangkut karakter manusia sebagai makhluk rasional yang memiliki kebebasan kehendak untuk menentukan hidupnya. Manusia secara pasti menginginkan kebenaran dan kebahagiaan. Dengan mengikuti akal budinya, manusia memperoleh martabat kemanusiaan dan kebebasan sejati. Manusia yang berakal budi dan beriman mampu melakukan tindakan yang amat penting bagi hidupnya sebagai manusia bagi dirinya dan bagi sesamanya.

2. *Eksistensi hukum moral.*

Konsepsi tatanan politik yang harus berlandaskan pada hukum moral menjadi kunci dalam tradisi Klasik karena moral selalu memiliki pilihan makna yang benar untuk pondasi politik. Moral yang menjadi acuan adalah berdasarkan hukum kodrat yakni suatu pola tindakan universal yang bisa dijalankan untuk semua orang dimanapun karena berdasarkan penghargaan martabat manusia. Hukum kodrat memberi manusia prinsip-prinsip universal yang harus dijalankan manusia demi kesempurnaan hidupnya. Tanpa ada hukum moral yang obyektif, tidak ada jaminan hidup berpolitik menjadi benar karena selalu akan diselewengkan dalam kepentingan tertentu, yakni kepentingan pihak yang terkuat.

3. *Sifat organik kekuasaan*

Etika politik klasik menekankan bahwa kekuasaan merupakan sarana bersama agar hidup manusia menjadi lebih produktif. Kekuasaan merupakan lembaga etis dengan tujuan moral, ia merupakan kumpulan orang-orang yang disatukan dalam upaya kooperatif untuk tujuan bersama. Dasar dari sifat organik manusia adalah kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang terpenggil untuk hidup bersama demi kebaikan semua. Hal ini berlawanan dengan teori mekanistik yang lebih menekankan klaim individu atas hidup bersama. Teori mekanistik lebih melihat bahwa kepentingan individu diatas kepentingan bersama sehingga kebersamaan hanyalah kesepakatan demi terpenuhinya kepentingan individu.

4. Pemerintahan yang konstitusional

Dalam pemerintahan, kekuasaan harus diarahkan pada pembatasan tertentu. Hal ini diatur oleh konstitusi yang menunjukkan bahwa penguasa dibatasi oleh hukum Tuhan dan hukum kodrat. Penguasa harus mengikuti konstitusi politik dalam menjalankan pemerintahannya.

5. Prinsip subsidiaritas

Subsidiaritas merupakan prinsip yang bertumpu pada pemahaman bahwa masyarakat sosial politik dibangun oleh berbagai tingkatan kalangan, tingkatan, jenis kelompok sosial tertentu dan bahwa setiap kelompok sosial tersebut menyadari penuh perannya untuk membangun kelompoknya dan kelompok yang lebih besar sementara kelompok yang lebih besar menyadari peran dan partisipasi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Gagasan klasik ini melihat bahwa semua kelompok sosial yang terorganisir, mulai dari keluarga hingga komunitas politik semata membantu manusia. Negara perlu membangun lembaga-lembaga yang lebih kecil untuk memenuhi kebutuhan manusia. Demikian juga ada keyakinan bahwa tidak semua hal dapat dipenuhi oleh negara, oleh karena itu masyarakat harus diberi kesempatan melalui lembaga sukarela untuk berpartisipasi demi kesejahteraan umum. Obyek pemerintahan dalam politik bukanlah untuk menyerap ataupun merusak anggota tubuh sosial berupa lembaga-lembaga yang sudah ada melainkan untuk memungkinkan masyarakat berfungsi secara benar demi kepentingan umum.

6. Pemerintahan demokrasi

Benih pemerintahan demokrasi tumbuh di era Yunani kuno kemudian berkembang hingga saat ini. Demokrasi berdasar pada keyakinan bahwa penguasa memegang kekuasaan hanya sebagai wakil rakyat dan otoritas politik memiliki sumber puncaknya pada Tuhan sehingga tidak ada manusia atau kelompok tertentu yang memiliki hak asasi mengatur dan memerintah orang lain. Dasar demokrasi adalah watak manusia yang ikut terlibat aktif mengontrol pemerintahan dalam mengusahakan kebahagiaan manusia. Manusia yang menolak ikut ambil

bagian dalam proses pemerintahan berarti menghalangi dirinya sendiri pada fase yang sangat penting dalam perkembangan wataknya.

4. Kesadaran Etika Berpolitik

Dari tradisi klasik dapat diperoleh beberapa hal yang menjadi prinsip bagi etika berpolitik yakni bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang berpolitik untuk memperjuangkan kebenaran dan kepentingan umum bagi kebahagiaan hidupnya, dan untuk memperjuangkan kepentingan umum dalam hidup berpolitik selalu berdasar pada hukum moral yang sumbernya adalah nilai-nilai kemanusiaan universal. Karena itu, kegiatan politik merupakan kesadaran kodrat manusia berjuang bersama sesamanya. Dalam politik semacam ini, pemerintah tidak akan memiliki kekuasaan yang mutlak, dia hanya menjalankan kekuasaannya, menganut prinsip subsidiaritas, dan berjiwa demokratis karena berasal dari rakyat.

Dengan dasar etika berpolitik semacam ini, lalu bagaimanakah penerapannya? Apakah dasar etika berpolitik tersebut otomatis menimbulkan kesadaran bagi hidup manusia terhadap dunia perpolitikan dewasa ini?⁷

Etika sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana menjalani kehidupannya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam hidupnya. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar tentang tindakan apa yang perlu untuk dilakukan. Etika dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan manusia khususnya juga dalam bidang politik. Etika dasar mengajarkan tentang moralitas dimana moralitas adalah menyangkut soal baik-buruk. Namun etika bukan sekedar persoalan baik-buruk, benar salah, tetapi, lebih bersifat membangun kesadaran dalam diri manusia.⁸ Kesadaran dalam memilih

7 Pandangan etika klasik yang berorientasi pada Negara dipertanyakan mengingat negara sebagai pusat kekuasaan tidak relevan lagi dan agama sebagai kunci perekat sosial tidak lagi kohesif. Lih. Reza Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Kanisius, Yogyakarta 2007, 3-4.

8 Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ETHOS yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah

suatu keputusan atas tindakan lebih penting. Etika mengantarkan manusia untuk memilih dengan rasional dan penuh kesadaran, sehingga ia mampu mempertanggungjawabkan bersama dengan segala konsekuensi dari keputusan tindakannya.

5. Kekhasan Etika Politik

Tujuan etika politik, menurut Paul Ricoeur, adalah mengarahkan pada hidup yang baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil.⁹ Definisi etika politik membantu kita menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang direduksi menjadi hanya sekadar etika individual yakni perilaku individu dalam bernegara.

Pengertian etika politik dalam perspektif Ricoeur mengandung tiga tuntutan yakni, **pertama**, upaya hidup yang baik bersama dan untuk orang lain; **kedua**, upaya memperluas lingkup kebebasan, **ketiga**, membangun institusi-institusi yang adil. Tiga tuntutan itu saling terkait. “Hidup yang baik bersama dan untuk orang lain” tidak mungkin akan terwujud kecuali bila seseorang mampu menerima pluralitas dan mau hidup dalam kerangka institusi-institusi yang adil. Hidup yang baik tidak lain adalah cita-cita kebebasan: kesempurnaan eksistensi atau pencapaian keutamaan. Institusi-institusi yang adil memungkinkan adanya perwujudan kebebasan dengan menghindarkan warganegara atau kelompok-kelompok dari saling merugikan satu sama lainnya. Sebaliknya, kebebasan warganegara mendorong inisiatif dan sikap kritis terhadap institusi-institusi yang tidak adil.¹⁰ Pengertian kebebasan yang dimaksud

laku manusia yang baik. Menurut para ahli, etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.

9 Paul Ricoeur, “The Moral, The Ethical, and The Political”, dalam : Gregory R. Johnson, Dan R. Stiver (ed.), *Paul Ricoeur and the Task of Political Philosophy*, Lexington Books, United Kingdom 2013, 18 dst.

10 Bagi Aristoteles, politik tidak dapat dipisahkan dari etika karena keduanya mempelajari aspek praktis kehidupan manusia. Etika dan politik berhubungan

adalah syarat fisik, sosial, dan politik yang perlu demi terlaksananya secara nyata kebebasan atau disebut *democratic liberties*: kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan sebagainya.

Dalam pemikiran Ricoeur, etika politik tidak hanya menyangkut perilaku individual saja, tetapi terkait dengan tindakan kolektif, yang sebenarnya berarti etika sosial.¹¹ Dalam etika individual, kalau orang mempunyai pandangan tertentu dapat langsung diwujudkan dalam tindakannya. Sedangkan dalam etika politik, yang merupakan etika sosial, untuk dapat mewujudkan pandangannya secara konkrit dibutuhkan persetujuan dari sebanyak mungkin warganegara karena menyangkut tindakan kolektif. Oleh karena itu, hubungan antara pandangan hidup seseorang dengan tindakan kolektif sifatnya tidak langsung, yang artinya untuk hal tersebut tercapai dibutuhkan adanya perantara.

Perantara ini berfungsi menjembatani pandangan pribadi dengan tindakan kolektif. Perantara itu bisa berupa simbol-simbol ataupun nilai-nilai, misalnya: simbol-simbol agama, demokrasi, dan nilai-nilai keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan sebagainya. Melalui simbol-simbol dan nilai-nilai itu, para politikus berusaha meyakinkan sebanyak mungkin warganegara agar dapat menerima pandangannya sehingga mendorong kepada tindakan atau gerakan bersama.

Karena itu, politik disebut seni karena membutuhkan kemampuan untuk meyakinkan masyarakat melalui wicara dan persuasi yang baik dan benar supaya nilai-nilai dan simbol demi kepentingan umum dapat dipahami. Etika politik akan kritis terhadap manipulasi atau penyalahgunaan nilai-nilai dan simbol-simbol. Etika politik berkaitan dengan masalah struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mengkondisikan tindakan kolektif. Tuntutan pertama etika politik adalah “hidup baik bersama dan untuk orang lain”. Pada tingkatan ini, etika politik dipahami sebagai perwujudan sikap dan perilaku warganegara dan

erat karena subyek keduanya adalah kebaikan bagi manusia. Korten, Yosef Keladu, *Partisipasi politik, Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles*, Penerbit Ledalero, 2010, 63.

11 Lih. Ricoeur, 19.

para politikus. Politikus yang baik adalah politikus yang jujur, santun, memiliki integritas, menghargai orang lain, menerima pluralitas, memiliki keprihatinan untuk kesejahteraan umum, dan tidak mementingkan golongannya. Jadi, politikus yang menjalankan etika politik adalah negarawan yang mempunyai keutamaan-keutamaan moral. Dalam sejarah filsafat politik, filsuf seperti Socrates sering dipakai sebagai model karena memiliki kejujuran dan integritas. Politik dimengerti sebagai seni yang mengandung kesantunan. Kesantunan politik diukur dari keutamaan moral.

Dalam bidang politik, manusia diajak memilih untuk memperjuangkan dasar etika berpolitik dengan penuh kesadaran dalam hidupnya sehari-hari. Manusia diajak kritis dan mampu menentukan sikapnya dengan benar atas sistem pemerintahan, hukum perundang-undangan dan banyak hal lainnya yang menyangkut kehidupan bersama. Untuk sampai pada kesadaran demikian manusia tidak dapat memperolehnya begitu saja, namun dapat dibantu dengan banyak hal, salah satunya dengan pendidikan.

6. Pendidikan Politik

Paham tentang pendidikan politik ternyata bukanlah sebuah konsep yang utuh dan memiliki banyak tafsir. Istilah pendidikan politik dalam Bahasa Inggris sering disamakan dengan istilah *political socialization*. Istilah *political socialization* jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah *political socialization*, orang banyak menyejajarkan pengertian antara pendidikan politik dan sosialisasi politik. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam artinya yang terbatas.

Menurut Ramlan Surbakti, dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik.¹² Surbakti berpendapat bahwa pengertian sosialisasi

¹² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999, 149.

politik dapat dikategori dalam dua pengertian yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses dialogis ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak misalnya dari sekolah, pemerintah, dan dari partai politik. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik bagi masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah masyarakat memperoleh pemahaman, orientasi dan mampu bersikap terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakatnya.

Sebaliknya, pendidikan politik dapat dinilai sebagai indoktrinasi politik, seperti apa yang dimaksud oleh Kartini Kartono tentang hubungan antara pendidikan dengan politik yakni bahwa pendidikan dilihat sebagai faktor politik dan kekuatan politik. Hal tersebut terjadi karena pendidikan di sekolah maupun lembaga-lembaga lainnya pada hakekatnya sebenarnya merupakan pencerminan dari kekuatan-kekuatan sosial-politik yang tengah berkuasa, dan juga merupakan perwujudan dari kehendak penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.¹³

Dari perbedaan pendapat tersebut diatas, penulis lebih sepakat dengan pemikiran Alfian yang mengatakan bahwa: "Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun".¹⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, **pertama**, dengan adanya pendidikan politik diharapkan setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang berjalan. **Kedua**, bahwa dengan adanya pendidikan politik, setiap individu tidak hanya sekedar

13 Kartini Kartono, *Wawasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*, CV Mandar Maju, Bandung, 1990, vii.

14 Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia*, Gramedia, Jakarta 1981, 235.

tahu saja tapi juga lebih jauh ia dapat menjadi seorang warga negara yang memiliki kesadaran politik untuk mampu mengemban tanggung jawab, dimana hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kadar partisipasinya dalam dunia politik.

Pembahasan tentang hubungan antara pendidikan dan politik telah dimulai oleh filsuf Yunani kuno yakni Plato dalam bukunya *Republic*. Plato merancang suatu sistem pendidikan yang bukan hanya menghasilkan suatu pandangan yang benar dan pemikiran yang tepat mengenai para pemimpin di masa datang, namun juga mengadakan seleksi terhadap orang-orang yang seharusnya tidak dapat dipilih menjadi pemimpin.

Menurut Plato, sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik. Plato menjelaskan bahwa ciri setiap kebudayaan adalah mempertahankan kontrol atas pendidikan. Kontrol tersebut ada di tangan kelompok-kelompok elite yang secara terus menerus menguasai kekuasaan politik, ekonomi, agama, dan pendidikan. Plato menggambarkan adanya hubungan dinamis antara aktivitas kependidikan dan aktivitas politik. di kalangan para ahli sendiri masih tersimpan pertanyaan besar, apakah usaha untuk menanamkan kesadaran berpolitik tersebut harus dilakukan melalui jalur pendidikan formal, sekolah misalnya atautakah tidak perlu, mengingat selalu ada politisasi dalam dunia pendidikan.

6.1. Pendidikan Politik di Indonesia

Pendidikan politik di Indonesia dalam dunia pendidikan nampaknya hingga dewasa ini belum memiliki bentuk yang jelas dan pasti. Hal ini mungkin masih terkait dengan adanya dialektika pemahaman antara paham politik harus ada dalam pendidikan dan paham bahwa pendidikan harus menjadi ruang belajar yang netral bagi semua. Mochtar Buchori menekankan pentingnya pemahaman akan politik diajarkan dalam dunia pendidikan.¹⁵ Alasannya: **Pertama**, adanya kesadaran tentang hubungan yang erat antara pendidikan dan politik. **Kedua**, adanya kesadaran akan

¹⁵ Muhammad Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Politik Penyelenggaraan Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, 30.

peran penting pendidikan dalam menentukan corak dan arah kehidupan politik. **Ketiga**, adanya kesadaran akan pentingnya pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dan politik. **Keempat**, diperlukan pemahaman yang lebih luas tentang politik. **Kelima**, pentingnya pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Dalam Inpres **No. 12 tahun 1982** tentang **Pendidikan Politik bagi Generasi Muda**, dijelaskan Tujuan diadakannya pendidikan politik secara formal adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Adapun yang menjadi landasan hukum pendidikan politik adalah:

- g. Landasan ideologi, yaitu Pancasila.
- h. Landasan konstitusi, yaitu UUD 1945.
- i. Landasan operasional, yaitu GBHN.
- j. Landasan historis, yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945”.

Adapun isi tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda antara lain:

1. Penanaman kesadaran berideologi, berbangsa, dan bernegara.
2. Kehidupan dan kerukunan hidup beragama.
3. Motivasi berprestasi.
4. Pengamalan kesamaan hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia.
5. Pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan ikut serta dalam politik.
6. Disiplin pribadi, sosial, dan nasional.
7. Kepercayaan pada pemerintah.
8. Kepercayaan pada pembangunan yang berkesinambungan.

Salah satu hal yang menarik dalam kurikulum pendidikan politik di Indonesia ialah telah dimasukkannya unsur materi agama yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam materi pendidikan politik. Akan tetapi, yang lebih urgen, bahan pendidikan politik di Indonesia haruslah bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Semua bahan ajar pendidikan politik tersebut telah tercakup dalam mata pelajaran PKn yang diajarkan secara formal di sekolah. Pertanyaannya adalah, apakah pendidikan semacam ini sudah mencukupi bagi rakyat Indonesia?

Selain melalui jalur formal, menurut Rusadi Kartaprawira, beberapa bentuk pendidikan politik dapat dilaksanakan bagi masyarakat, antara lain melalui:¹⁶

1. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang pada umumnya dapat membentuk opini umum.
2. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media).
3. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.

Dari berbagai jalur pendidikan politik yang ada, sesungguhnya yang diharapkan adalah semua sarana pendidikan tersebut mampu untuk memobilisasi simbol-simbol nasional sehingga pendidikan politik mampu meningkatkan daya pikir dan daya tanggap rakyat terhadap permasalahan politik. Selain itu, bentuk pendidikan politik yang dipilih harus mampu meningkatkan rasa keterikatan diri yang tinggi terhadap tanah air, bangsa dan negara.

6.2. Tantangan Pendidikan Politik di Indonesia

6.2.1. Paham Etika Politik Kontemporer

Paham Etika Politik Kontemporer dibedakan dari Paham Etika Politik Klasik. Paham ini mencoba melepaskan diri dari pengaruh ajaran

¹⁶ Rusadi Kartaprawira, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru Algensindo, Bandung 2004, 56.

agama dan kebudayaan Yunani dan mengutamakan rasionalitas manusia. Paham etika kontemporer yang berkembang dewasa ini dan memiliki beberapa nilai penting dan aktual bagi bangsa Indonesia yakni:

a) *Pluralisme*

Pluralisme berarti paham yang menekankan pada kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya, untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan wajar bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, adat. Pluralisme mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, toleransi. Pluralisme memerlukan kematangan kepribadian seseorang dan sekelompok orang. Lawan dari jiwa pluralis adalah intoleran, yakni sikap yang mau memaksakan kehendak dan pandangannya (ideologi, keyakinan religius, dll.) kepada orang lain. Prinsip pluralisme terungkap dalam Ketuhanan Yang Maha Esa yang menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada orang yang boleh didiskriminasi karena keyakinan religiusnya. Sikap ini adalah bukti keberadaban dan kematangan karakter kolektif bangsa.

b) *Hak asasi Manusia (HAM)*

Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak-hak asasi manusia (HAM) menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan oleh sesamanya. Manusia harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.¹⁷ Hak-hak asasi manusia bersifat mutlak dan kontekstual. HAM bersifat mutlak karena manusia memiliki HAM bukan karena pemberian dari negara atau masyarakat, melainkan karena ia manusia, semata dari Sang Pencipta. HAM bersifat kontekstual karena baru mempunyai fungsi dan karena itu mulai disadari, di ambang modernitas jaman, di mana manusia tidak lagi dilindungi oleh adat dan tradisi, dan justru sebaliknya, mendapat ancaman dari negara modern. Kemanusiaan yang adil dan beradab juga menolak kekerasan dan eksklusivisme suku dan ras. Pelanggaran hak-hak asasi manusia tidak

17 Hak asasi berkaitan dengan ciri manusia sebagai pribadi, dan tercakup didalamnya hak hidup, hak diperlakukan sebagai pribadi, hak memilih agama yang dianut, hak yang sama didepan hukum dll. Lih., J. Darminta, *Praktek Pendidikan Nilai*, Kanisius, Yogyakarta 2006, 54.

boleh dibiarkan begitu saja (impunity). Solidaritas mengatakan bahwa kita tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, dan kita hidup bersatu senasib sepenanggungan. Manusia hanya hidup menurut harkat dan martabatnya apabila ia hidup bukan hanya bagi dirinya sendiri, melainkan ia menyumbang sesuatu bagi hidup sesamanya. Hidup sosial manusia berkembang mulai dari keluarga, kampung, kelompok etnis, kelompok agama, kebangsaan, hingga solidaritas sebagai manusia. Dalam hal ini termasuk salah satunya adalah rasa kebangsaan. Manusia menjadi seimbang apabila semua bagian tersebut dihayati dalam konteks saling berkaitan dan memiliki keterbatasannya satu dengan yang lain. Budaya solidaritas dalam masyarakat dewasa ini dirusak secara perlahan oleh budaya korupsi. Korupsi mengerogoti nilai-nilai kejujuran, tanggung-jawab, sikap objektif, dan kompetensi serta kepedulian. Korupsi membuat manusia mengalami kesulitan mencapai sesuatu yang berkualitas dalam hidupnya yang wajar sehari-hari.

c) *Demokrasi*

Prinsip “kedaulatan rakyat” menyatakan bahwa tak ada manusia, atau sebuah elit, atau sekelompok ideologi, atau sekelompok pemimpin agama manapun berhak untuk menentukan dan memaksakan kehendaknya dengan ancaman maupun bentuk-bentuk agitasi lainnya. Demokrasi memiliki landasan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan arah kemana mereka mau dipimpin.¹⁸ Demokrasi adalah “kedaulatan rakyat plus prinsip keterwakilan”. Hal ini dapat diartikan bahwa demokrasi sebenarnya memerlukan sebuah sistem yang meneruskan kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik. Demokrasi akan dapat berjalan baik apabila dilaksanakan dalam dua dasar yakni pertama, pengakuan dan jaminan terhadap HAM dan yang kedua, pengakuan atas supremasi Hukum. Hal ini berarti bahwa perlindungan terhadap HAM dan supremasi Hukum menjadi prinsip utama berdemokrasi sehingga mayoritas tidak menjadi kediktatoran mayoritas. Hal kedua adalah kekuasaan dijalankan atas dasar, dan dalam ketaatan terhadap hukum (Negara hukum demokratis).

18 J. Kristiadi, *Demokrasi Dan Etika Bernegara*, Impulse, Yogyakarta 2008, 12.

Maka kepastian hukum merupakan unsur hakiki dalam demokrasi karena dapat mencegah pemerintahan menjadi otoriter dan absolut.

d) *Keadilan Sosial*

Keadilan merupakan norma moral paling mendasar dalam kehidupan masyarakat. Maksud baik apa pun bentuknya akan kandas apabila tindakan tersebut dinilai melanggar keadilan. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Tuntutan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideologis, sebagai pelaksanaan ide-ide, ideologi-ideologi, agama-agama tertentu. Dalam hal ini keadilan sosial juga tidak sama dengan sosialisme. Keadilan sosial adalah keadilan yang terlaksana secara menyeluruh dalam sendi-sendi hidup masyarakat. Dalam kenyataannya, keadilan sosial diusahakan terutama dengan membongkar ketidakadilan yang ada dalam masyarakat yang bersifat struktural dan bukan pertama-pertama individual. Artinya, ketidakadilan tidak pertama-tama terletak dalam sikap kurang adil bagi individu tertentu melainkan struktur-struktur politik, ekonomi, sosial dan ideology yang tidak adil. Struktur-struktur tersebut hanya dapat diurai secara kritis dengan pendidikan politik. Ketidakadilan struktural yang sangat membutuhkan perhatian saat ini bagi Indonesia adalah kemiskinan.

6.2.2. Politik Moral dan Politik Kontekstual

Dalam pendidikan etika berpolitik perlu juga dibuka realitas adanya pemikiran politik yang digunakan sebagai alat kekuasaan dan yang menyimpang dari prinsip moral. Salah satu pemikiran politik tersebut berasal dari filsuf Machiavelli. Menurut Machiavelli, Etika politik, yang hanya puas dengan perwujudan norma-normanya dan tidak memperhitungkan real politik akan cenderung mandul. Seperti dikatakan Machiavelli, kenyataan politik adalah semata-mata hubungan kekuasaan atau pertarungan antar kekuatan.¹⁹ Masyarakat perlu dilihat bukan saja terdiri dari individu-individu sebagai subyek hukum, tetapi terdiri

19 F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern, dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Gramedia, Jakarta 2004, 20.

dari kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan yang saling berlawanan satu dengan yang lainnya. Politik yang baik adalah politik yang berhasil mencapai tujuannya dengan apapun caranya, demikian pendapat Machiavelli. Filsuf Italia ini yakin tidak ada hukum yang bisa mengatur masyarakat kecuali hadirnya kekuatan yang dapat memaksanya. Hukum dan hak yang selanjutnya akan melegitimasi kekuatan atau kekuasaan.²⁰ Dengan demikian, tindakan penguasa atas kepentingan politiknya melalui berbagai cara termasuk manipulasi dan korupsi dapat dihalalkan. Situasi Indonesia saat ini tidak jauh dari gambaran Machiavelli itu.²¹ Politik dan moral dapat dilihat menjadi dua hal yang berbeda dan tidak berkaitan satu dengan lainnya. Etika politik seakan menjadi tidak relevan lagi melihat situasi nyata kancah perpolitikan di Indonesia. Dalam kondisi demikian, relevansi etika politik dan pendidikan politik terletak pada kemampuannya untuk menjinakkan dan menyadarkan berbagai kekuatan politik yang ada dan mengatur kepentingan-kepentingan kelompok dengan membangun institusi-institusi yang lebih adil.

7. Urgensi Pendidikan Etika Politik

Dalam situasi masyarakat kita yang menuntut keadilan, berpihak pada korban, memberdayakan masyarakat melalui *civil society*, membangun demokrasi sebenarnya nampaklah upaya mewujudkan etika politik. Dalam situasi kacau, bukankah etika politik menjadi makin relevan?

Legitimasi tindakan-tindakan tersebut mau tidak mau harus merujuk pada kesadaran akan norma-norma moral, nilai-nilai hukum atau peraturan dan perundang-undangan. Di sini letak pentingnya pendidikan

20 Machiavelli berusaha memisahkan etika dari politik dan pada saat yang sama ia sebenarnya membuat penilaian etis dalam wilayah politik. Lih. Schmandt, 251-257.

21 Merupakan kesimpulan atas pendapat Yudi Latif tentang situasi Indonesia: “Ketujuh dosa ini sekarang telah menjadi warna dasar kehidupan kita. Kehidupan kota (*polis*) yang mestinya menjadi basis peradaban (*madani*) terjerumus pada apa yang disebut Machiavelli sebagai “kota Korup” (*citta Corrotissima*), atau...”, Yudi Latif, *Membumikan Etika Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara*, Prosiding Konggres Pancasila V 2013: Strategi Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dalam menguatkan Semangat Keindonesiaan, 31 Mei-1 Juni 2013, Penerbit Ombak, Yogyakarta 2013, 72.

etika berpolitik agar masyarakat mampu berbicara dengan otoritas.

Etika politik juga berbicara dari sisi korban dan pendidikan politik membuat masyarakat peka akan situasi korban politik. Politik yang kejam dan tidak adil akan mengakibatkan jatuhnya korban. Kondisi dan situasi korban akan membangkitkan rasa simpati masyarakat, reaksi terusik dan protes terhadap ketidakadilan.²² Keberpihakan pada korban tidak akan menolerir politik yang kejam. Jeritan korban adalah berita duka bagi penegakan etika politik.

Disamping itu, pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yang berlarut-larut akan membangkitkan kesadaran bagi masyarakat akan perlunya penyelesaian yang mendesak dan adil.²³ Resolusi konflik politik tidak akan terwujud bila masyarakat tidak sadar politik dan tidak mengacu pada etika politik. Seringnya muncul pernyataan “perubahan harus konstitusional”, menunjukkan etika politik tidak bisa diabaikan begitu saja dalam pendidikan masyarakat.

8. Penutup

Membicarakan tema pendidikan dan kesadaran politik dalam wilayah etis ternyata menyiratkan pertanyaan seberapa kuat bangunan perpolitikan di negara Indonesia ini sudah terbangun dan seberapa kokoh bangunan kesadaran politik yang ada dalam masyarakat Indonesia, mengingat kebutuhannya yang harus menyangga berbagai arus dan kepentingan politik yang cukup beragam di saat ini.

Dalam tulisan ini memang belum digagas adalah bagaimana pengaruh politik dari luar negeri sangat mempengaruhi cara pandang kehidupan masyarakat di Indonesia, mengingat Indonesia masuk dalam arus globalisasi politik dunia.²⁴ Kekuatan pengaruh politik antara dunia Barat dan dunia Islam terasa makin kuat mendominasi situasi politik di Indonesia. Mampukah etika berpolitik yang benar dijalankan di Indonesia

22 David Bourchier & Vedi R. Hadiz, *Indonesian Politics and Society*, Routledge Curson, London & New York 2003, 197.

23 *Ibid.*,198.

24 Kekuatan-kekuatan bisnis dan kelompok religius fundamentalis dapat memaksakan pengaruhnya pada kebijakan publik suatu negara, Lih. Wattimena, 137.

mengingat kuatnya pengaruh perpolitikan Internasional saat ini? Bila Indonesia harus masuk dalam satu paham perpolitikan dunia politik dunia semacam apa yang akan diikutinya? Ataupun Indonesia memiliki sistem politik tersendiri yang khas?

Nampaknya Pendidikan politik yang lebih riil dan mendasar berpijak pada norma dan etika kemanusiaan yang sifatnya filosofis dan terlepas dari unsur agama apapun menjadi kebutuhan urgen untuk diajarkan bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN:

Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia*, Gramedia, Jakarta 1981.

Bourchier, David & Vedi R. Hadiz, *Indonesian Politics and Society*, Routledge Curson, London & New York 2003.

Darminta, J., *Praksis Pendidikan Nilai*, Kanisius, Yogyakarta 2006.

Budi Hardiman, F., *Filsafat Modern, dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Gramedia, Jakarta 2004.

Kristiadi, J., *Demokrasi Dan Etika Bernegara*, Impulse, Yogyakarta 2008.

Koten, Yosef Keladu, *Partisipasi politik, Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles*, Penerbit Ledalero, Maumere 2010.

Kantaprawira, Rusadi, *Sistem Polilik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru Algensindo, Bandung 2004.

Kartono, Kartini, *Wawasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung 1990.

Yudi Latif, *Membumikan Etika Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara*, Prosiding Kongres Pancasila V 2013: *Strategi Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dalam menguatkan Semangat Keindonesiaan*, 31 Mei-1 Juni 2013, Penerbit Ombak, Yogyakarta

2013.

- Ricoeur, Paul, "The Moral, The Ethical, and The Political", dalam : Gregory R. Johnson, Dan R. Stiver (ed.), *Paul Ricoeur and the Task of Political Philosophy*, Lexington Books, United Kingdom 2013.
- Schmandt, J. Henry, *A History of Political Philosophy*, terj. *Filsafat Politik, Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2002.
- Sirozi, Muhammad. *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Politik Penyelenggaraan Pendidikan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 1999.
- Tafsir, Ahmad, *Filsafat Umum, Akal dan hati sejak Thales sampai Capra*, Rosda Karya, Bandung 2008.
- Wibowo, I, *Negara Centeng, Negara dan Saudagar di Era Globalisasi*, Kanisius, Yogyakarta 2010.
- Wattimena, Reza AA, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Kanisius, Yogyakarta 2007.